

# OMBUDSMAN RI DAN DPRD SUMSEL SINERGI AWASI PELAYANAN PUBLIK

Selasa, 25 Februari 2025 - sumsel

**PALEMBANG** - Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pengawas penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari pengawas internal dan eksternal, dimana pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat, Ombudsman RI, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota, pada Senin (24/2/2025), Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut berlangsung hangat dan mengalir dengan topik utama yang jadi pembahasan antara Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah beserta jajaran Keasistenan Pencegahan Maladministrasi mengenai permasalahan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, serta sejumlah permasalahan lainnya.

Menurut Andie, permasalahan pelayanan publik yang menonjol dan mendapat banyak atensi dari masyarakat Bumi Sriwijaya di tahun 202 terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi tingkat SMAN di Kota Palembang, penerbitan Surat Hak Milik (SHM) via PTSL di sejumlah kabupaten/kota yang bertahun-tahun tidak selesai, lampu penerang jalan yang selalu padam, rekrutmen PPPK yang tidak transparan, dan sejumlah permasalahan pelayanan publik lainnya.

Khusus PPDB SMAN Jalur Prestasi 2024 di Kota Palembang, Ombudsman RI telah menerbitkan Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dijelaskan oleh Adrian, Rekomendasi tersebut bersifat wajib dan mengikat, sehingga diharapkan agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Selatan yang baru dilantik. Selanjutnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga berkonsentrasi terhadap pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Sebagai bentuknya, di 2025 pelayanan publik atau aksesibilitas penyandang disabilitas menjadi topik kajian, tentu saja dengan tidak meninggalkan pencegahan dan pengawasan terhadap objek pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan sejumlah permasalahan pelayanan publik yang terjadi di Bumi Sriwijaya tersebut, Adrian mengatakan urgensi sinergi dan kolaborasi dengan sesama lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, yakni DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Ombudsman Sumsel ke depan, di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dia memastikan walaupun saat ini terjadi efisiensi anggaran secara signifikan di Kantor Perwakilan Sumsel, namun kegiatan pengawasan dan pencegahan maladministrasi di akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Andie Dinialdie menyambut baik kedatangan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan ke rumah rakyat tersebut. Ia menjelaskan, selama ini pihaknya mengikuti perkembangan kegiatan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, utamanya terkait permasalahan PPDB SMAN Jalur Prestasi 2024 di Kota Palembang. Ia juga mengharapkan ditengah efisiensi anggaran yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, agar kegiatan pencegahan maladministrasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Selatan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Badan Usahan Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, tetap dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi sesama lembaga pengawas pelayanan publik.

Andie Dinialdie mengatakan, semua permasalahan pelayanan publik yang terjadi di Sumatera Selatan harus mendapatkan perhatian. Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu, pihaknya didatangi kelompok masyarakat penyandang disabilitas Sumsel yang mengeluhkan standar pelayanan tidak memihak mereka. Oleh karena itu, ke depannya akan dilakukan kegiatan bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, dengan diawali melakukan pengawasan fasilitas dan standar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di sejumlah titik, yang akan diteruskan dengan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya.